

**JURNAL ILMIAH MANAJEMEN BISNIS DAN INOVASI
UNIVERSITAS SAM RATULANGI (JMBI UNSRAT)**

**ANALISIS INOVASI *IDe AsSALAM* (Inisiasi Desa Nabung Saham Modal Sampah)
DALAM PERSPEKTIF NEW PUBLIC GOVERNANCE**

Dinda N. Maharani, Firda Gangsar Ramadanti, Nabila Rasya Annisa

Universitas Airlangga, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

ARTICLE INFO

Keywords:

New Public Governance, Public Service Innovation, IDe AsSALAM

Kata Kunci:

New Public Governance, Inovasi Pelayanan Publik, IDe AsSALAM

Corresponding author:

Dinda N. Maharani

dinda.novyasari.maharani-2022@fisip.unair.ac.id

Abstract. *Public service innovation in era of rapid development with technology and information that guides local governments to provide improvements in the quality of public services to improving people's welfare. The central government through the Ministry of State Apparatus Empowerment and Bureaucratic Reform (PANRB) is holding the 2022 Public Service Innovation Competition Series (KIPP) as a form of support and encouragement for public service innovation that deserves appreciation. One of the most interesting public service innovations is IDe AsSalam, innovation to save waste as capital stock in improving the local economy. Through the perspective of New Public Governance (NPG), this innovation can be considered as a form of community involvement in decision making and sustainable use of local resources. The purpose of this research to analyzes IDe AsSalam from NPG and discusses challenges faced in implementing innovation. This research used qualitative approach and data were collected through observations with literature review. In the end, IDe AsSalam can be considered as positive innovation and has potential to strengthen community involvement in waste management with sustainable decision-making at the local level. However, to maximize the potential for this innovation requires cooperation and support from various parties, including the government, society and other stakeholders.*

Abstrak. Inovasi pelayanan publik di era perkembangan yang pesat dengan teknologi dan informasi yang memandu pemerintah daerah dan instansi pemerintah untuk memberikan peningkatan kualitas pelayanan publik serta inovasi pelayanan publik yang kreatif dan berkontribusi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menggelar Rangkaian Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) 2022 sebagai bentuk dukungan dan dorongan inovasi pelayanan publik yang patut diapresiasi. Salah satu inovasi pelayanan publik yang menarik adalah IDe AsSalam. Inovasi yang mengajak masyarakat untuk menyimpan sampah sebagai modal dalam meningkatkan ekonomi lokal. Melalui perspektif *New Public Governance (NPG)*, inovasi ini dapat dianggap sebagai bentuk keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pemanfaatan sumber daya lokal secara berkelanjutan. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis IDe AsSalam dari perspektif *New Public Governance* dan membahas tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikan inovasi tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan pengumpulan data dilakukan melalui observasi dengan tinjauan pustaka. Pada akhirnya IDe AsSalam dapat dianggap sebagai inovasi yang positif dan berpotensi memperkuat keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah dan pengambilan keputusan yang berkelanjutan di tingkat lokal. Namun, untuk memaksimalkan potensi inovasi tersebut diperlukan kerjasama dan dukungan dari berbagai pihak, antara lain pemerintah, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

PENDAHULUAN

Permasalahan lingkungan terutama terkait dengan sampah menjadi isu yang kompleks dan serius di banyak wilayah, termasuk di Indonesia. Sampah yang tidak terkelola dengan baik dapat mencemari lingkungan, lalu mengancam kesehatan masyarakat, serta merusak ekosistem alam. Dalam menghadapi permasalahan ini, diperlukan inovasi dan pendekatan yang baru dalam pengelolaan sampah berbasis pada prinsip-prinsip tata kelola publik yang modern dan efektif. Pemerintah didorong untuk melakukan berbagai perubahan dan inovasi sebagai model pendekatan baru dalam memperbaiki kualitas pelayanan sektor publik. Hal ini dilakukan sebagai respon berbagai keluhan masyarakat atas kebijakan publik yang lambat dan kurang terstruktur (Salam, 2021). Inovasi ini telah dilakukan sejak tahun 2014 dengan diterbitkannya Top 99 inovasi dua tahun berikutnya (Taufik & Warsono, 2020).

Pada Peraturan Menteri PANRB No. 30 Tahun 2014, inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang mem-berikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Salah satu inovasi pelayanan publik yang muncul dalam pengelolaan sampah dengan melibatkan berbagai kalangan di masyarakat adalah IDe AsSALAM. Kementerian Agama melalui Inovasi IDe AsSALAM (Inisiasi Desa Nabung Saham Modal Sampah) masuk dalam Top 99 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) tahun 2022 yang diselenggarakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau KemenPANRB dan Inovasi yang dibuat oleh UIN Sunan Ampel Surabaya ini mampu bersaing dengan ribuan inovasi lainnya, hingga akhirnya terpilih menjadi Top 99 (kemenag.go.id).

Inovasi ini merupakan suatu konsep yang menggabungkan prinsip - prinsip ekonomi syariah dan pengelolaan sampah yang berbasis pada partisipasi masyarakat. Program ini merupakan kerjasama antara tiga pihak yakni BEI, UINSA dan PT Indopremier Sekuritas. Berawal dari inovasi pelayanan publik di lingkup universitas yang diikuti oleh mahasiswa dan para civitas universitas lainnya, program ini dapat dikembangkan untuk digunakan secara umum oleh masyarakat luas. Modal saham dari sampah dapat digunakan untuk membiayai program pengelolaan sampah, termasuk dalam pembangunan infrastruktur pengelolaan sampah, pengolahan sampah menjadi produk bernilai ekonomi, serta pendanaan program sosial atau pemberdayaan masyarakat.

Pengelolaan sampah menggunakan pendekatan berbasis partisipasi masyarakat menjadi semakin penting. Masyarakat diharapkan aktif terlibat dalam proses pengelolaan sampah, mulai dari pengurangan, pengumpulan, pengolahan, hingga pemanfaatan sampah. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dapat meningkatkan kesadaran lingkungan, mengurangi beban pemerintah dalam pembiayaan pengelolaan sampah, serta meningkatkan keberlanjutan program pengelolaan sampah. Apalagi inovasi IDe AsSALAM tidak hanya berfokus pada pengelolaan sampah untuk lingkungan namun juga menjadi kesempatan masyarakat mempelajari investasi melalui sampah menjadi modal saham yang diharapkan akan meningkatkan ekonomi masyarakat.

Investasi terdiri dari investasi dalam bentuk aktiva riil (*riil assets*) seperti emas dan barang berharga lain, tanah, barang barang seni atau real estate, dan investasi dalam bentuk surat-surat berharga atau sekuritas (*marketable securities atau financial assets*) yang mana tujuan berinvestasi untuk meningkatkan kekayaan, baik sekarang dan di masa depan (Putri et al., 2023). Modal sampah yang dikumpulkan oleh mahasiswa hingga masyarakat dapat memperoleh dana yang bisa digunakan untuk menabung saham di Indopremier Sekuritas.

Ide AsSALAM merupakan hasil sinergi Galeri Investasi Syariah (GIS) dengan Bank Sampah Syariah (BSS) UIN Sunan Ampel Surabaya yang tergabung ke dalam Laboratorium FEBI UIN Sunan

Ampel Surabaya yang diketuai oleh Dr. Hj. Fatmah, ST. MM. Dalam hal ini BSS menjadi perantara investor untuk memperoleh dana yang akan diinvestasikan (Syafitri, 2020).

Dalam konteks pengelolaan sampah, pendekatan *New Public Governance* (NPG) menjadi relevan untuk dianalisis dalam kaitannya dengan inovasi IDe AsSALAM. NPG merupakan pendekatan yang mengedepankan prinsip-prinsip tata kelola publik yang baru, yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan, keterbukaan informasi, akuntabilitas, serta kolaborasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan publik.

Kontribusi warga negara ke dalam pemerintahan demokratis tergantung pada bagaimana lembaga-lembaga demokratis dan administratif membentuk peluang untuk berpartisipasi (Ansell & Torfing, 2021). IDe AsSALAM memberikan peluang bagi berbagai pihak untuk ikut serta dalam pengembangannya karena dari awal inovasi ini dibentuk untuk memberikan pelayanan publik yang partisipatif, kolaboratif, dan kerjasama antar pihak yang terlibat. Secara keseluruhan, mudah untuk melihat perbedaan antara produksi bersama individu dan produksi bersama kolektif.

Produksi bersama individu menggambarkan situasi-situasi di mana pelanggan, secara individu atau dalam kelompok, berpartisipasi dalam produksi atau sebagian produksi dari layanan yang mereka gunakan, menerima manfaat yang sebagian besar bersifat pribadi (Brudney & England, 1983, hlm. 63).

Namun, penggunaan modal saham dari sampah dalam pelayanan publik juga menghadapi tantangan dan kendala. Diantaranya adalah penentuan harga dan nilai ekonomi dari produk yang dihasilkan dari pengelolaan sampah, regulasi dan kebijakan yang mendukung penggunaan modal saham dari sampah, serta peran dan partisipasi aktif masyarakat dalam program ini.

Oleh karena itu, analisis inovasi IDe AsSALAM dalam perspektif *New Public Governance* menjadi penting untuk dilakukan guna memahami bagaimana konsep ini dapat memberikan solusi inovatif dalam pengelolaan sampah, serta menggali potensi dan tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Perspektif NPG ini juga dapat memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah, mengurangi beban anggaran pemerintah dalam pembiayaan program pengelolaan sampah, serta meningkatkan keberlanjutan program pengelolaan sampah melalui pendekatan berbasis ekonomi.

Dengan mengkaji inovasi IDe AsSALAM dalam perspektif pelayanan publik dalam konteks NPG, diharapkan artikel ini dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana pendekatan tersebut dapat mempengaruhi implementasi dan hasil dari inovasi IDe AsSALAM dalam pengelolaan sampah, serta implikasinya terhadap pelayanan publik yang lebih baik dalam konteks pengelolaan sampah di desa.

TINJAUAN PUSTAKA

Saat ini, perkembangan teknologi dan perubahan paradigma dalam pelayanan publik menuntut pemerintah untuk menjadi lebih baik dengan kreatifitas berfikir serta memberikan pelayanan publik yang maksimal. Perubahan adalah hal yang mutlak terjadi dalam kehidupan. Perubahan tersebut menuntut tindakan penyesuaian untuk menghadapinya. Jika penyesuaian tidak dilakukan, maka dapat berpengaruh pada kualitas keberlangsungan hidup sebuah masyarakat. Kondisi tersebut juga berlaku bagi organisasi, baik organisasi publik maupun swasta.

Organisasi publik melakukan efisiensi untuk peningkatan nilai dan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, sedangkan sektor swasta menggunakan efisiensi sebagai kesempatan untuk berkompetisi di pasar guna memperoleh laba yang lebih besar (Hartley, 2005; Nurmandi, 2006). Adanya

sebuah inovasi pelayanan publik sebagai salah satu upaya untuk mencapai tujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik (Putri & Mutiarin, 2018).

Era New Normal menjadi masa ujian bagi pelayanan sektor publik untuk dapat dievaluasi keberhasilan atau kekurangannya di masa mendatang (Muzdalifah et al., 2020).

Gagasan serta kreativitas menjadi hal yang perlu perhatian khusus, bukan saja dalam teknis namun menyentuh aspek kebijakan. Aspek yang perlu mendapat perhatian menurut Buchari (2021) meliputi:

- a. Memberikan perhatian kepada staf pelaksana pelayanan, pengguna serta middle manager untuk mengembangkan ide kreatif
- b. Memiliki staf yang kompeten dalam memanfaatkan beragamnya latar belakang sebagai inspirasi untuk pengembangan gagasan baru
- c. Peningkatan tingkat kemauan untuk belajar
- d. Pengembangan kapasitas untuk berpikir secara kreatif dengan teknik formal
- e. Memfokuskan diri pada *outcome*
- f. Menyediakan waktu khusus dan kesempatan pada staf untuk memikirkan tentang gagasan alternatif
- g. Menyediakan portal khusus untuk menyimpan, mengakses dan bertukar gagasan
- h. Mengembangkan cara berfikir *out of the box*
- i. Pengembangan kompetensi staf dan tim pelayanan
- j. Menyediakan sistem intensif yang memadai sebagai wadah inovasi

Munculnya model *New Public Governance* atau NPG menurut Bingham, Nabatchi, & O'Leary (2005) telah memindahkan gelombang global dari bentuk organisasi dan persaingan tradisional, mengakui pengaturan kolaboratif yang berbeda sebagai opsi tata kelola yang layak di berbagai tingkatan (Howlett & Ramesh, 2017).

Ini menekankan pada hubungan antar-organisasi, jaringan, kemitraan kolaboratif, tata kelola partisipatif dan bentuk lain dari hubungan multi-aktor (Agranoff & McGuire, 2003; Emerson, Nabatchi, & Balogh, 2012; Huxham & Vangen, 2013; Kickert, Klijn, & Koppenjan, 1997; Stoker, 2006; Wu, Ramesh, & Howlett, 2015).

NPG melibatkan hubungan antar-organisasi, jaringan, kolaborasi kerjasama, tata kelola partisipatif dan bentuk-bentuk lain dari hubungan multi-aktor (Agranoff & McGuire, 2003; Emerson, Nabatchi, & Balogh, 2012; Huxham & Vangen, 2013; Kickert, Klijn, & Koppenjan, 1997; Stoker, 2006; Wu, Ramesh, & Howlett, 2015).

New Public Governance (NPG) memberikan perpaduan dari *consumer co-production* dan *participative co-production* yang dapat diterapkan pada 'public service' dengan memberikan pelayanan semaksimal mungkin kepada masyarakat secara *collaborative* (Sorrentino et al., 2018). Inovasi pada perubahan paradigma ini membuat, pemerintah harus melibatkan semua aktor dalam melayani publik yaitu individu, organisasi, dan sistem untuk membuat interaksi antara pemberi layanan publik (pemerintah) dan yang menerima layanan publik (rakyat).

Alasan *New Public Governance* (NPG) baru (Osborne 2006), semakin menekankan pentingnya kolaborasi antar-organisasi yang efektif, baik antara lembaga pemerintah (misalnya, "kolaborasi antar lembaga," Bardach 2001) dan antara lembaga pemerintah dan organisasi sektor swasta (misalnya, "tata kelola kolaboratif," Ansell dan Gash 2007), untuk efektivitas pembuatan kebijakan publik dan pemberian layanan.

Kolaborasi dengan pemangku kepentingan eksternal memungkinkan akses ke kumpulan besar keterampilan, sumber daya dan pengetahuan, dan memfasilitasi sinergi dan pembelajaran, di mana inovasi dapat muncul (Sørensen dan Torfng 2018). "Inovasi kolaboratif" atau "*collaborative innovation*" semacam itu tidak hanya mencakup aktor publik, tetapi juga aktor swasta seperti perusahaan dan organisasi nonprofit, serta pengguna dan warga negara (Callens, 2022).

Stephen P. Osborne (2009) menyimpulkan "*New Public Governance*" didasarkan pada sosiologi organisasi dan "*social network theory*", memiliki karakteristik pluralisme, memperhatikan manajemen organisasi, menekankan proses dan hasil pelayanan, menggunakan kepercayaan sebagai mekanisme tata kelola dan memiliki nilai neo-corporatism.

Menurut Runya, et al. (2015) generalisasi para sarjana dan informasi tata kelola publik baru lainnya, kami merangkum konotasi teoretis atau fitur paradigma dari "*Pemerintahan Publik Baru*" sebagai enam aspek berikut :

1. Pertama, *New Public Governance* menekankan pada penyebaran kekuasaan. Menurut "*New Public Governance*", selain pemerintah dan pasar, organisasi lain dalam masyarakat juga memiliki hak untuk berpartisipasi dalam manajemen urusan publik, dan pada saat yang sama memiliki hak keputusan untuk berpartisipasi dalam menyelesaikan masalah publik.
2. Kedua, *New Public Governance* menekankan koordinasi pemerintah. Sejak lama pemerintah dianggap sebagai pusat administrasi publik, mulai dari perumusan kebijakan hingga implementasi. *New Public Governance* mencoba mengubah pemerintah dari paternalisme menjadi koordinator dan dari "*pemerintah besar*" menjadi kecil, dan mengoordinasikan lebih banyak kepentingan sosial, membangun platform dialog, dan mengintegrasikan sumber daya publik. Dengan kata lain, administrator dan publik bernegosiasi dan mencoba mencapai konsensus.
3. Ketiga, *New Public Governance* membentuk jaringan yang kompleks. Berbeda dari Struktur garis tunggal dari administrasi tradisional dan struktur ganda pasar pemerintah dari the *New Public Management*, the *New Public Governance* mengintegrasikan organisasi sosial dan individu untuk membentuk jaringan kompleks yang berisi konsentrasi dan pembatasan kekuasaan dari semua aspek. Anggota jaringan ini berisi pemerintah, pasar, masyarakat, organisasi publik, komunitas dan warga negara individu, dll. Setiap badan utama dibatasi oleh aturan formal dan informal, membentuk jaringan "*New Public Governance*" yang dikumpulkan bersama oleh sumber daya yang saling bergantung dan interaktif. Ini adalah semacam kerja sama sosial bahwa interaksi di antara anggota membuat seluruh jaringan tetap relatif stabil.
4. Keempat, jaringan pemerintah (*governance network*) didasarkan pada pertukaran sumber daya. Menurut *New Public Governance*, bentuk jaringan oleh produk dan layanan publik dapat menyediakan sumber daya sosial yang melimpah bagi anggotanya untuk bertukar, termasuk mata uang, informasi, dan teknologi. *NPG* memperkenalkan mekanisme berbagi ke dalam manajemen administrasi publik, untuk memenuhi kebutuhan yang berbeda dari subjek kepentingan dan warga negara.
5. Kelima, jaringan tata kelola bergantung pada kepercayaan dan stabilitas kontrak. Menjaga stabilitas antara interior dan eksterior mengandalkan kekuatan sesuai dengan manajemen administrasi tradisional. *New Public Governance* bergantung pada kontrak

khusus yang bergantung pada kepercayaan status dan reputasi anggota. Dengan kata lain, *New Public Governance* tidak bergantung pada pembatasan, aturan dan sistem yang spesifik dan efektif, tetapi pada semacam kepercayaan informal, yang membuat jaringan tata kelola publik lebih fleksibel dan berubah.

6. Keenam, menghargai peran organisasi sosial publik. “*The New Public Management*” memperhatikan output dan hasil dari sektor publik, menganggap subjek layanan publik sebagai pelanggan bukan warga negara, dan menekankan peran pasar dalam menyediakan barang publik dan proses layanan. Namun, menurut “*The New Public Governance*”, esensi pelayanan publik adalah untuk melayani warga negara dan mengejar kepentingan publik. Jadi penting untuk menghargai dampak organisasi publik. Organisasi publik sosial menyediakan barang dan jasa publik bukan untuk menghasilkan keuntungan tetapi memecahkan masalah sosial dengan cara kerja sama sukarela.

New Public Governance adalah kesimpulan dari Administrasi Tradisional dan “*New Public Management*”. NPG tidak hanya berfokus pada mekanisme operasi organisasi, tetapi juga lebih memperhatikan efisiensi administrasi publik dan partisipasi warga dalam masalah pemerintahan.

Perkembangan paradigma “*New Public Govenrnance*” dalam topik terkait yaitu pelayanan publik. menyiratkan beberapa konsep baru terkait “*collaborative innovation*” semacam itu tidak hanya mencakup aktor publik, tetapi juga aktor swasta seperti perusahaan dan organisasi nonprofit, serta pengguna dan warga negara (Callens, 2022) , *consumer co-production* dan *participative co-production* secara *collaborative* yang dapat diterapkan pada ‘public service’ dengan memberikan pelayanan semaksimal mungkin kepada masyarakat (Sorrentino et al., 2018), dan “*social network theory*” yang memiliki karakteristik pluralisme, memperhatikan manajemen organisasi, menekankan proses dan hasil pelayanan, menggunakan kepercayaan sebagai mekanisme tata kelola dan memiliki nilai neo-corporatism (Runya et al., 2015).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dimana bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis tentang inovasi pelayanan publik terkait pelaksanaan program IDe AsSALAM yang mencerminkan cara pandang administrasi pemerintahan menggunakan *New Public Governance*. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi dan *literatur review* serta data - data pendukung lainnya.

Menurut Patton (1990) dalam Haryono (2020:19), menegaskan bahwa observasi merupakan metode penelitian yang penting untuk memahami dan memperkaya pengetahuan tentang fenomena yang diteliti. Sedangkan untuk *literatur review*, Snyder (2019: 333) mengatakan *literature review* adalah sebuah metodologi penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan dan mengambil intisari dari penelitian sebelumnya serta menganalisis beberapa overview para ahli yang tertulis dalam teks.

Penelitian ini dilakukan di Galeri Investasi Syariah (GIS) dengan Bank Sampah Syariah (BSS) UIN Sunan Ampel Surabaya, sebagai sumber pelaksanaan IDe AsSALAM. Observasi pada 2 organisasi di UINSA tersebut dapat memberikan informasi secara deskriptif dan naratif menjelaskan prosedur dan kegiatan pelayanan publik melalui IDe AsSALAM dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sampah adalah bahan yang terbuang dari sumber hasil aktivitas manusia maupun proses alam yang belum memiliki suatu nilai ekonomis. Keberadaan sampah-sampah ini turut mencemari lingkungan mengingat bahwa tidak semua sampah dapat terurai dengan baik. Salah satu sampah yang banyak ditemukan adalah sampah plastik. Plastik ialah material dibuat dari nafta yang ialah produk turunan minyak bumi yang diperoleh melewati proses penyulingan dan karena plastik termasuk barang yang kokoh sehingga banyak masyarakat menggunakan plastik dalam kehidupan sehari - hari.

Sampah plastik ini meliputi barang-barang bekas seperti bungkus mi instan, bungkus kopi, botol air mineral, galon, dan lain sebagainya. Semua sampah ini merupakan hasil dari kegiatan konsumsi masyarakat Indonesia dari tahun ke tahun. Kegiatan pembuangan sampah ini tidak akan ada habisnya. Terlebih, banyak masyarakat yang membuang sampah sembarangan yang akan merusak lingkungan. Hal ini berakibat pada timbulnya masalah terhadap lingkungan sekitar, kehidupan sosial dalam masyarakat dan habitat hewan, serta akan berpengaruh terhadap kesehatan. Akibat nyata dari permasalahan ini adalah banjir yang kerap terjadi di kota-kota besar.

Inisiasi Desa Nabung Saham Modal Sampah atau IDe AsSALAM adalah salah satu inovasi yang diusung Laboratorium FEBI UINSA di bawah bimbingan Dr. Fatmah, ST, MM. Layanan publik ini memberikan wadah untuk mahasiswa UINSA dan warga masyarakat, terutama ibu-ibu di daerah nelayan, serta di kampung Binaan UINSA, untuk mengenal saham dengan bermodalkan sampah. Dengan mengumpulkan sampah, mereka mampu membeli saham di Indofood serta perusahaan-perusahaan lainnya dan atas capaian tersebut, Ide ASSALAM juga telah memecahkan Rekor MURI Indonesia untuk UINSA dengan kategori “Menabung Saham dari Penjualan Sampah terbanyak dari mahasiswa”. Kementerian Agama memiliki lima prioritas program 2020 – 2024, salah satunya adalah Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing. IDe AsSALAM sejalan dengan tujuan dari prioritas tersebut. Inovasi ini berhasil menggerakkan masyarakat desa menjadi masyarakat yang produktif dengan menjadi pelaku dan investor di pasar modal.

Inovasi Bank sampah merupakan konsep pengumpulan sampah kering dan dipilah serta memiliki manajemen layaknya perbankan, tetapi yang ditabung bukan uang melainkan sampah. UINSA sebagai pelopor IDe AsSALAM melalui Bank Sampah Syariah (BSS) adalah lembaga yang bergerak di bidang koperasi dengan aplikasi syar'i, BSS mulai beroperasi pada 21 april 2014 diresmikan oleh Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya yang diwakili oleh Ibu Hj. Shofiyah Asmu, M.Si. Perlahan tapi pasti BSS mampu mengajak mahasiswa akan sadar lingkungan, dengan kampaye “*ayo ubah sampah jadi rupiah*” BSS mengajak seluruh lapisan masyarakat UIN Sunan Ampel untuk berpartisipasi terhadap sampah dengan cara menabung sampah dan pada akhirnya menjadi modal saham. Temuan produk IDe AsSALAM (Nabung Saham Modal Sampah) berhasil menjembatani keterbatasan dana dan keinginan mahasiswa untuk berinvestasi di pasar modal.

Anggapan terkait sampah yang mempunyai kesan tidak berguna dan menimbulkan masalah, anggapan tersebut dapat dirubah dari tangan kreatif civitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), benda buangan itu justru bernilai rupiah. Maka temuan produk IdeAsSALAM ini bisa mempermudah mahasiswa yang minat dalam berinvestasi dengan modal hanya menggunakan sampah. Kegiatan mengumpulkan sampah seperti botol-botol bekas, kertas-kertas bekas makalah, kardus, dan sebagainya, disetorkan ke BSS sesuai dengan prosedur yang diterapkan di BSS dan GIS, mendorong mahasiswa tersebut untuk bisa membeli saham yang sesuai, sehingga dengan itu mahasiswa bisa memanfaatkan sampah-sampah yang sebenarnya masih bernilai.

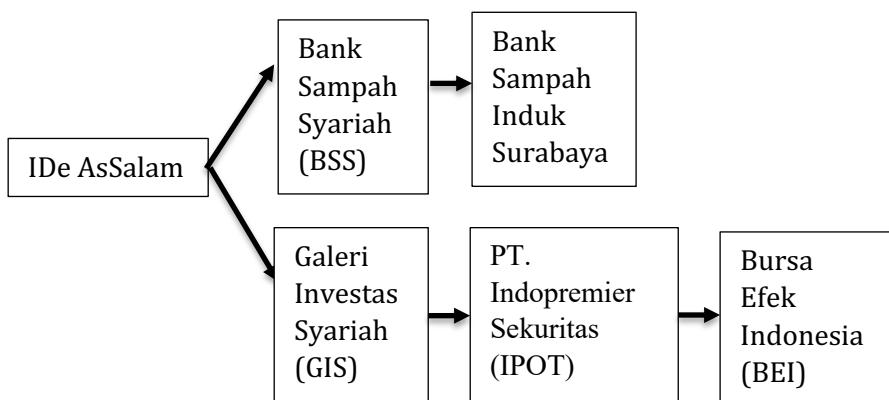
Keikutsertaan masyarakat dalam program pengelolaan sampah tentunya dapat mengurangi beban lingkungan dengan adanya bahaya sampah, selain itu masyarakat juga dapat memperoleh keuntungan ekonomis dari mengikuti program pengelolaan sampah dimana masyarakat bisa mengolah sampah tersebut menjadi barang yang berguna seperti membuat tas, baju, dan perlengkapan lainnya dari sampah masyarakat juga dapat membuat pupuk organik dari sampah-sampah tersebut.

Hal ini sesuai dengan pelayanan publik menggunakan *New Public Governance* yang menggunakan konsep *consumer co-production* dan *participative co-production* secara *collaborative* yang dapat diterapkan pada 'public service' serta dapat memberikan pelayanan semaksimal mungkin kepada masyarakat (Sorrentinoa.et al , 2018).

Namun, pada Ide AsSALAM berfokus pada modal saham dengan menabung sampah di BSS UINSA. Partisipasi dapat bersifat pasif maupun aktif, partisipasi bersifat pasif berarti sikap, prilaku, dan tidak yang dilakukan seseorang dengan tidak mengganggu kegiatan pembangunan. Sedangkan partisipasi yang bersifat aktif seperti ikut berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang ada. Partisipasi masyarakat tentunya dipengaruhi oleh keadaan sosial masyarakat yang bersangkutan (Ginanjar & Mubarrok, 2020).

Partisipasi masyarakat juga dipengaruhi oleh jumlah anggota keluarga, dimana semakin besar jumlah anggota keluarga berarti semakin besar pula jumlah kebutuhan keluarga yang harus dipenuhi.

BSS UINSA dalam mengelola sampah yang dikumpulkan dari mahasiswa ataupun masyarakat yang menabung sampah bekerja sama dengan Bank Sampah Induk Surabaya sebagai pengumpul sampah. Dari jumlah sampah yang BSS setorkan akan ditimbang dan menghasilkan uang tunai yang akan digunakan sebagai modal operasional kegiatan nabung sampah di BSS itu sendiri.



Gambar 1 :

Organisasi yang terlibat dalam pelaksanaan IDE AsSALAM di UINSA
(Sampah jadi Saham)

Pada dasarnya, IDE AsSALAM ini diterapkan pada lingkup mahasiswa UINSA untuk menjadi program sadar lingkungan serta memanfaatkan peluang pengelolaan sampah menjadi tabungan sampah bagi setiap nasabah hingga menghasilkan keuntungan secara material.

Demi melaksanakan kegiatan operasional IDE AsSALAM , maka diperlukan mekanisme bank sampah yang terdapat beberapa tahap, mulai dari pengumpulan, pemilahan hingga pencatatan. Proses tersebut meliputi:

- Pemilahan sampah rumah tangga oleh nasabah bank sampah
- Penyetoran sampah ke bank sampah oleh nasabah bank sampah

- c. Penimbangan, sampah yang sudah ditimbang kemudian ditimbang sesuai dengan kesepakatan minimal.
- d. Pencatatan, pencatatan bobot bank sampah setelah penimbangan
- e. Hasil sampah dilaporkan kedalam buku tabungan nasabah bank sampah
- f. Jika tabungan sudah bisa ditarik secara tunai sesuai jumlah minimal, maka pendapatan yang diterima dari tabungan sampah tersebut dapat digunakan untuk membeli sampah.

Pada IDE AsSALAM ini, pengelolaan sampah akan menjadi saham sehingga sampah yang telah ditabung akan memberikan *feedback* secara ekonomi. Setelah program ini dilaksanakan diruang lingkup pendidikan yaitu tingkat perguruan tinggi dan berhasil memberikan perkembangan terkait minat mahasiswa untuk berinvestasi saham dari hasil tabungan sampah, maka inovasi ini dikembangkan lagi menjadi salah satu program baru yaitu Kampung Intan bertujuan mengenalkan saham melalui pengelolaan sampah di tingkat desa.

Kepala Perwakilan BEI Jatim, Dewi Sriana Rihantyasni mengatakan bahwa Program Kampung Intan yang diinisiasi oleh Galeri Investasi Syariah BEI Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Sunan Ampel (GIS BEI FEBI UINSA) bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), BEI, PT Indopremier Sekuritas (IPOT) dan Bank Sampah Induk di Surabaya ini, merupakan program lanjutan/pengembangan dari program Nabung Saham Modal Sampah (Assalam) yang telah di-launching pada tahun 2019 lalu (kilasjatim, 2021).

Sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat dicirikan oleh adanya keterlibatan masyarakat penggunanya dalam kegiatan perencanaan dan pengoperasian sistem tersebut. Ada 8 prinsip pengelolaan sampah berbasis masyarakat yaitu :

- 2. Keterlibatan masyarakat
- 3. Keterjelasan batasan wilayah
- 4. Strategi pengelolaan sampah yang terpadu
- 5. Pemanfaatan sampah yang optimal
- 2. Fasilitas persampahan yang memadai
- 3. Kelompok penggerak yang mumpuni
- 4. Optimasi pendanaan sendiri
- 5. Pola kemitraan yang menguntungkan

Adapun terdapat tiga komponen sistem pengelolaan sampah dengan menabung sampah di bank sampah yaitu: penabung baik individual maupun komunal (kelompok masyarakat), petugas bank sampah atau *teller* dan pengepul. Dalam menjalakan organisasi di bank sampah terdapat struktur pengelola bank sampah yaitu Direktur bank sampah, *teller*, sekretaris, dan bendahara, yang semuanya berasal dari masyarakat.

Mekanisme dalam menabung sampah di bank sampah ada dua, yaitu menabung sampah secara individual dan menabung sampah secara komunal. Mekanisme menabung sampah secara individual, warga memilah sampah kertas, plastik, kaleng atau botol dari rumah dan secara berkala ditabung di bank sampah, sedangkan mekanisme menabung sampah secara komunal, warga memilah sampah kertas, plastik, kaleng atau botol dari rumah dan secara berkala di tabung di TPS (Tempat Pembuangan Sampah) yang ada di setiap RT (Kelompok Masyarakat), kemudian petugas bank mengambil sampah di tiap TPS (Tempat Pembuangan Sampah).

Bank sampah adalah suatu wadah bagi masyarakat untuk membangun sistem pengelolaan sampah yang bertanggung jawab melalui kegiatan edukasi dan penerapan prinsip 4R (*Rethink, Reduce, Reuse* dan *Recycle*) secara kolektif dalam keseharian. Bank sampah memiliki peranan untuk mengatasi solusi masalah lingkungan salah satunya yaitu merubah pola pikir manusia. Perubahan pola pikir manusia terhadap pengelolaan sampah dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 1 : Perubahan Pola Pikir Manusia Terhadap Pegelolaan Sampah

Pola Pikir Lama	Pola Pikir Baru
Sampah tidak bernilai ekonomi	Sampah bernilai ekonomi
Buang sampah pada tempatnya	Pilah sampah sesuai jenisnya
Sistem buang - kumpul - angkut ke TPS/TPA	Sistem 4R (Rethink, Reduce, Reuse dan Recycle)

Sumber : Bank Sampah Induk Surabaya, 2023

BSS UINSA bekerja sama dengan Bank Sampah Induk Surabaya dalam mengelola sampah. Bank Sampah Induk Surabaya merupakan layanan edukasi dan jasa pengelolaan sampah yang dalam pengelolaanya memiliki legalitas di Pemerintah Kota Surabaya. Berikut tiga legalitas yang dimiliki oleh Bank Sampah Induk Surabaya.

1. SK Dinas Lingkungan Hidup Surabaya: 660.1/77/436.7.12/2017
2. Akte Notaris Yayasan: Evi Mardiana, SH.No.09.Tgl.02.Augustus.2017
3. SK Menkumham Yayasan: AHU-0012341.AH.01.04 Tahun 2017

Dalam pengelolaan Bank Sampah, Bank Sampah Induk Surabaya memiliki tiga komponen utama, diantaranya.

1. Pengelola Bank Sampah

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Bank Sampah Induk Surabaya memiliki struktur organisasi meliputi ketua, sekretaris, bendahara, divisi edukasi, divisi penimbangan, divisi pemilahan, dan divisi pengepakan.

2. Pembeli Sampah

Sampah yang telah dikumpulkan dapat dibeli oleh bank sampah induk, pengepul kecil, pengepul besar, pabrik daur ulang, dan pengguna produk daur ulang.

3. Penabung Sampah

Adapun yang dapat menabung sampah diantaranya pengelola dan warga umum baik tingkat RT, RW, Desa, atau Kota.

Dari ketiga komponen diatas, adapun kunci penguatan utama yang sebaiknya hendak untuk diketahui, diantaranya.

1. Syarat Pengelola Bank Sampah

Terdapat dua syarat untuk pengelola bank sampah yaitu wajib memiliki rasa kepedulian dan tanggung jawab terhadap masalah sosial dan lingkungan dan memiliki keahlian yang dibutuhkan.

2. Syarat Pembeli Sampah

Adapun syarat untuk pembeli sampah yaitu memiliki ijin usaha, harga beli tinggi, pembayaran tunai, dan menerima berbagai varian sampah.

3. Cara Mendapatkan Penabung Sampah

Terdapat beberapa cara untuk mendapatkan penabung sampah atau nasabah yaitu edukasi menarik, layanan memuaskan, dan memberikan apresiasi terhadap rasa kepedulian dan tanggung jawab terhadap masalah sosial dan lingkungan.

Ketika tabungan sampah sudah terkumpul, maka hasil tabungan itu dapat ditarik sebagai pendapatan uang tunai dan diinvestasikan melalui pembelian saham. Disinilah peran Galeri Investasi Syariah (GIS) dibutuhkan. GIS UINSA memberikan wadah mahasiswa dan masyarakat luas untuk mengenal investasi lebih lanjut. Berhubungan dengan IDE AsSALAM, setelah nasabah tabungan sampah dapat menarik hasilnya secara tunai dan berminat berinvestasi dengan saham, maka GIS akan mengarahkannya untuk membuka akun saham yang bekerja sama dengan IPOT.

Berdasarkan pemahaman Runya, et al. (2015) tentang *New Public Governance*, IDE AsSALAM dapat dianalisis menggunakan 6 generalisasi tata kelola publik baru yang telah dirangkum secara teoretis atau fitur paradigma dari "Pemerintahan Publik Baru" atau NPG sebagai enam aspek berikut ini ;

1. Pertama, *New Public Governance* menekankan pada penyebaran kekuasaan. Menurut "New Public Governance", selain pemerintah dan pasar, organisasi lain dalam masyarakat juga memiliki hak untuk berpartisipasi dalam manajemen urusan publik, dan pada saat yang sama memiliki hak keputusan untuk berpartisipasi dalam menyelesaikan masalah publik.

Pada Inovasi IDE AsSALAM , partisipasi setiap kelompok masyarakat sangat diperlukan untuk mengembangkan inovasi ini. Masyarakat sebagai investor sekaligus yang menerima pelayanan publik dapat berkontribusi dalam proses nabung sampah hingga menjadi saham.

Lembaga pengelola sebagai penyedia pelayanan publik juga menerapkan konsep *co-production* sebagai salah satu konsep yang berada pada NPG karena memberikan kesempatan masyarakat atau kelompok/orang lain yang terlibat bekerja sama mengembangkan dan menjalankan inovasi ini. Pemerintah pun ikut adil dalam mengapresiasi inovasi ini karena IDE AsSALAM dapat menjadi TOP 45 Inovasi Pelayanan Publik 2022 sehingga pengembangannya akan dipantau secara rutin demi memberikan pelayanan publik yang maksimal.

2. Kedua, *New Public Governance* menekankan koordinasi pemerintah. Sejak lama pemerintah dianggap sebagai pusat administrasi publik, mulai dari perumusan kebijakan hingga implementasi.

New Public Governance mencoba mengubah pemerintah dari paternalisme menjadi koordinator dan dari "pemerintah besar" menjadi kecil, dan mengor-dinasikan lebih banyak kepen-tingan sosial, membangun platform dialog, dan mengintegrasikan sumber daya publik. Dengan kata lain, administrator dan publik bernegosiasi dan mencoba mencapai konsensus. IDE AsSALAM memberikan kesempatan pemerintah untuk melakukan koordinasi dengan lembaga diluar pemerintah atau pihak kedua/ketiga seperti UINSA yang merupakan rumah dari IDE AsSALAM. Inovasi ini murni berasal dari kreatifitas civitas UINSA dalam menyediakan inovasi pelayanan publik yang unik dan bermnafaat bagi masyarakat. Hal ini memerlukan koordinasi yang bagus agar kerjasama yang terbentuk anatar stakeholder dapat berjalan dengan baik

3. Ketiga, *New Public Governance* membentuk jaringan yang kompleks. *New Public Governance* mengintegrasikan organisasi sosial dan individu untuk membentuk jaringan kompleks yang berisi konsentrasi dan pembatasan kekuasaan dari semua aspek.

Anggota jaringan ini berisi pemerintah, pasar, masyarakat, organisasi publik, komunitas dan warga negara individu, dll. Setiap badan utama dibatasi oleh aturan formal dan informal, membentuk jaringan " *New Public Governance*" yang dikumpulkan bersama oleh sumber daya yang saling bergantung dan interaktif. Ini adalah semacam kerja sama sosial bahwa interaksi di antara anggota membuat seluruh jaringan tetap relatif stabil.

Pada Ide AsSALAM poin ketiga ini benar – benar dilakukan. Menciptakan inovasi ini tidak hanya melibatkan 1 atau 2 pihak saja namun beberapa pihak dari universitas (civitas akademik), pemerintah, pihak swasta seperti Indopremier Sekuritas, dan masyarakat umum.

4. Keempat, jaringan pemerintah (*governance network*) didasarkan pada pertukaran sumber daya. Menurut *New Public Governance*, bentuk jaringan oleh produk dan layanan publik dapat menyediakan sumber daya sosial yang melimpah bagi anggotanya untuk bertukar, termasuk mata uang, informasi, dan teknologi.

New Public Governance memperkenalkan mekanisme berbagi ke dalam manajemen administrasi publik, untuk memenuhi kebutuhan yang berbeda dari subjek kepentingan dan warga negara.

IDe AsSALAM menyediakan sumber daya sosial yang bermanfaat bagi lingkungan maupun penerima pelayanan publik ini. Program ini melibatkan banyak sumber daya melalui beberapa kolaborasi antara BSS, GIS, Bank Sampah Induk Surabaya, IPOT, Perguruan Tinggi, mahasiswa hingga masyarakat.

Kebutuhan akan menjaga lingkungan ditingkatkan lagi menjadi kebutuhan berinvestasi. Jaringan pemerintah yang dihasilkan pada IDe AsSALAM membuka berbagai kesempatan baru untuk mengembangkan inovasi ini secara luas dan memberikan pertukaran sumber daya yang dibutuhkan.

5. Kelima, jaringan tata kelola bergantung pada kepercayaan dan stabilitas kontrak. *New Public Governance* bergantung pada kontrak khusus yang bergantung pada kepercayaan status dan reputasi anggota.

Dengan kata lain, *New Public Governance* tidak bergantung pada pembatasan, aturan dan sistem yang spesifik dan efektif, tetapi pada semacam kepercayaan informal, yang membuat jaringan tata kelola publik lebih fleksibel dan berubah.

Inovasi pelayanan publik yang unik seperti Ide AsSALAM berawal dari kreatifitas lembaga pendidikan yaitu UINSA dalam mengelola sampah hingga menjadi saham. Kemudian melibatkan jaringan swasta dari luar UINSA yaitu Indopremier Sekuritas (IPOT) sebagai sekuritas atau pasar modal yang dijadikan partner oleh Galeri Investasi Syariah UINSA untuk para mahasiswa hingga masyarakat umum yang berniat berinvestasi apalagi investasi hasil nabung sampah.

Jaringan tata kelola yang terbentuk berdasarkan kepercayaan antara anggota pelaksana dan pengguna layanan itu sudah cukup untuk menjalankan inovasi ini saat ini. Aturan dapat menjadi fleksibel namun tetap memenuhi kriteria atau pedoman bank sampah dan pembelian saham menggunakan hasil dari nabung saham.

6. Keenam, menghargai peran organisasi sosial publik. Menurut "The New Public Governance", esensi pelayanan publik adalah untuk melayani warga negara dan mengejar kepentingan publik.

Jadi penting untuk menghargai dampak organisasi publik. Organisasi publik sosial menyediakan barang dan jasa publik bukan untuk menghasilkan keuntungan tetapi memecahkan masalah sosial dengan cara kerja sama sukarela.

Ide AsSALAM sangat sesuai dengan poin ini jika dilihat menggunakan perspektif NPG. Inovasi ini dibuat untuk memberikan pelayanan publik dengan memperhatikan lingkungan. Pengelolaan sampah sebagai ide utama inovasi ini hingga dijadikan sebuah investasi merupakan ide yang sangat mengutamakan kepentingan publik. Kerjasama yang dibentuk pun dengan sukarela tidak ada paksaan, sehingga lingkungan pelayanan publik yang seperti ini akan memberikan dampak baik bagi kepuasan masyarakat.

PENUTUP

IDe AsSalam merupakan sebuah inovasi yang menarik dalam memanfaatkan sampah sebagai modal saham di desa-desa di Indonesia. Dalam perspektif New Public Governance, inovasi ini dapat dilihat sebagai suatu bentuk keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pemanfaatan sumber daya lokal secara berkelanjutan. Dalam konteks ini, IDe AsSalam dapat dianggap sebagai bentuk pemerintah yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dalam memecahkan masalah sampah di lingkungan mereka. Inovasi ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam proses pengelolaan sampah dan mendapatkan keuntungan finansial dari limbah yang merekahasilkan.

Namun, ada beberapa tantangan yang perlu diatasi dalam implementasi inovasi ini, seperti pendidikan dan pelatihan yang cukup bagi masyarakat tentang pengelolaan sampah yang efektif dan aman, serta sistem pengumpulan dan pengolahan sampah yang memadai. Selain itu, peran pemerintah dan stakeholder lainnya dalam mendukung dan memfasilitasi implementasi inovasi ini juga sangat penting.

Secara keseluruhan, IDe AsSalam dapat dianggap sebagai sebuah inovasi yang positif dan berpotensi untuk memperkuat keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah dan pengambilan keputusan yang berkelanjutan di tingkat lokal. Namun, untuk memaksimalkan potensi inovasi ini, diperlukan kerja sama dan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan stakeholder lainnya.

Rekomendasi dan yang dapat diberikan untuk mengembangkan IDe AsSALAM menjadi sebuah inovasi pelayanan publik yang dapat diterima dengan mudah oleh masyarakat dan dapat digunakan dalam waktu yang lama , antara lain ;

1. Menyusun strategi untuk meningkatkan investor saham bermodal sampah yang diakomodasi oleh bank sampah dan tidak hanya berada di universitas namun di lingkungan masyarakat secara umum agar tidak terbatas untuk civitas akademik.

Melanjutkan program Ide AsSALAM yang telah dikembangkan hingga ke desa melalui program baru yaitu Kampung Intan.

2. Melakukan sosialisasi atau pemasaran kepada sasaran utama yaitu masyarakat yang dituju untuk mengenalkan lebih dalam lagi IDe AsSALAM sehingga dapat segera digunakan oleh publik. Jika

melibatkan investasi secara online maka sosialisasi ini juga diperlukan sebagai sarana memberikan literasi secara informasi dan teknologi untuk mengaksesnya.

3. Inovasi IDe AsSALAM ini adalah inovasi pelayanan publik yang peduli akan lingkungan serta memberikan pengetahuan ekonomi tentang saham atau investasi yang diharapkan dapat meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Untuk menuju tujuan ini memerlukan komitmen antara pelaksana inovasi dan penerima inovasi. Komitmen ini dapat diwujudkan dengan partisipasi langsung dari masyarakat dalam proses pengumpulan, pengelolaan, hingga menjadikan sampah menghasilkan saham. Maka dari itu, diperlukannya pelatihan atau seminar untuk masyarakat yang berminat mempelajari inovasi ini dan akan disebar luaskan ke masyarakat lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansell, C., & Torfing, J. (2021). Co-creation: the new kid on the block in public governance. *Policy and Politics*, 49(2), 211–230.
- Ardian, R., & Sudrartono, T. (2021). Pengaruh Bauran Promosi Terhadap Minat Beli Kembali Cat Dulux Di Depo Keramik Katapang Bandung. *JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi)*, 8(3). <https://doi.org/10.35794/jmbi.v8i3.35854>
- Bank Sampah Induk Surabaya.(2023). <https://banksampahhinduksurabaya.id/tentang-kami/>
- Callens, C. (2022). User Involvement as a Catalyst for Collaborative Public Service Innovation. *Journal of Public Administration Research and Theory*.
- Haryono, C. G. (2020). Ragam Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi. Jawa Barat : CV Jejak (Jejak Publisher).
- Kilasjatim.(2021). Program Kampung Intan , Upaya BEI Berdayakan Ibu Rumah Tangga Dan Generasi Muda Berinvestasi. Diakses pada 27 Juni 2023 dari website : <https://kilasjatim.com/program-kampung-intan-upaya-bei-berdayakan-ibu-rumah-tangga-dan-generasi-muda-berinvestasi/>
- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.(2014). Peraturan Menteri PANRB Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik. Jakarta
- Putri, D. A., Helena Putri, E., Diah Renatha, F., & Muttaqien, Z. (2023). Pemanfaatan Limbah Plastik Di Era Digital Sebagai Pendukung Dalam Pembelian Saham. *Vol 1 No 1 (2023): Prosiding Caption*, 108–121.
- Putri, L. D. M., & Mutiarin, D. (2018). Efektifitas inovasi kebijakan publik; Pengaruhnya pada kualitas pelayanan publik di Indonesia. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*.
- Salam, R. (2021). Perubahan dan Inovasi Pelayanan Publik Di Era New Normal Pandemi Covid-19 Changes and Innovations in Public Services in the New Normal. *Journal of Public Administration and Government*, 3(1 April), 28–36.
- Sorrentino, M., Sicilia, M., & Howlett, M. (2018). Understanding co-production as a new public governance tool. *Policy and Society*. <https://doi.org/10.1080/14494035.2018.1521676>
- Syafitri, A. P. (2020). Strategi Promosi Untuk Meningkatkan Investor Saham Bermodal Sampah (Studi di Galeri Investasi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya). *Al-Musthofa: Journal Of Sharia Economics*, 3, 1–95.
- Snyder, H. 2019. 'Literature Review as a Research Methodology: An overview and guidelines'. *Journal of Business Research*, 104, pp. 333–339.

- Taufik, & Warsono, H. (2020). Birokrasi Baru untuk New Normal Tinjauan Model Perubahan Birokrasi. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*.
- Runya, X., Qiqui, S., & Wei, S. (2015). The Third Wave of Public Administration: The New Public Governance. *Canadian Social Science*.